

# Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah: *Systematic Literature Review*

Bagas Andhyka Prasetyo<sup>1</sup>, Roni Prasetyowibowo<sup>2</sup>

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

[bagas.22076@mhs.unesa.ac.id](mailto:bagas.22076@mhs.unesa.ac.id), [roni.22079@mhs.unesa.ac.id](mailto:roni.22079@mhs.unesa.ac.id)

Indonesia

## Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia semakin kompleks dengan volume sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana sebagian besar masih belum dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia guna memetakan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pedoman PRISMA, menganalisis artikel empiris yang diterbitkan antara tahun 2021–2025 yang bersumber dari Google Scholar. Evaluasi dilakukan menggunakan enam dimensi kebijakan publik menurut William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara umum belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan infrastruktur, alokasi anggaran yang memadai, serta penyesuaian strategi kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah sehingga dalam pengelolaannya dapat berjalan lebih baik dan efisien.

**Kata kunci:** evaluasi, kebijakan, pengelolaan sampah, *systematic literature review*

## I. PENDAHULUAN

Sampah merupakan sisa dari kegiatan atau aktivitas manusia yang sudah tidak memiliki nilai guna serta berpotensi menimbulkan dampak negatif karena volumenya terus bertambah seiring waktu (Rayani et al., 2025). Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh berbagai negara termasuk Indonesia adalah terkait pengelolaan sampah. Dampak yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tapi juga berpengaruh hingga mencakup perhal sosial, ekonomi, dan budaya. Isu pengelolaan sampah berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global (SDGs) ke-12, yang menitikberatkan pada pentingnya pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Sholehatin & Lituhayu, 2025). Di Indonesia sendiri sampah menjadi persoalan lingkungan yang klasik namun cukup kompleks, karena terjadi di berbagai wilayah baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, serta gaya hidup masyarakat mendorong peningkatan jumlah sampah dari waktu ke waktu (Erinaldi et al., 2025).

Sampah yang dihasilkan Indonesia terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan 37 juta ton per tahunnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67,8% atau sekitar 25 juta ton sampah tidak dapat terkelola. Hal tersebut menunjukkan

bahwa diperlukan adanya peningkatan kapasitas pengelolaan sampah melalui perencanaan yang efektif, dukungan infrastruktur yang memadai, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan dan pemilihan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah yang baik dan efektif memerlukan partisipasi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, karena upaya mengatasi masalah sampah merupakan tanggung jawab bersama untuk mencegah gangguan terhadap lingkungan (Rayani et al., 2025).

Meskipun urgensi penanganan sampah sangat penting, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di banyak daerah masih bertumpu pada paradigma atau kebiasaan lama, yaitu kumpul-angkut-buang. Selain itu, metode pembuangan terbuka (open dumping) masih banyak diterapkan di tempat pembuangan akhir (TPA), yang berpotensi mencemari tanah, air, dan udara, serta mengancam kesehatan masyarakat (Primanto & Puspitasari, 2025). Padahal, konsep pengelolaan sampah berkelanjutan seperti zero waste dan ekonomi sirkular yang menawarkan perubahan paradigma menuju pengurangan sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R) dapat meminimalkan residu yang masuk ke TPA (Erinaldi et al., 2025). Ketidakkampuan sistem konvensional dalam menangani volume sampah yang terus meningkat sering kali mengakibatkan kelebihan kapasitas (overload) pada fasilitas pembuangan akhir, yang pada akhirnya memicu masalah lingkungan yang lebih luas.

Hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sering kali disebabkan oleh kesenjangan antara regulasi yang dirancang dengan pelaksanaan teknis di lapangan (Jati, 2025). Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran operasional, minimnya infrastruktur seperti tempat penampungan sementara (TPS) dan armada pengangkut, serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai (Putri et al., 2024). Selain aspek teknis dan finansial, faktor non-teknis seperti rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah juga menjadi kendala signifikan. Lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar-lembaga turut memperparah situasi, sehingga target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah sering kali sulit tercapai.

Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, evaluasi kebijakan menjadi instrumen krusial untuk menilai keberhasilan program pengelolaan sampah. Evaluasi kebijakan publik diperlukan untuk mengukur kinerja berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan,

perataan, responsivitas, dan ketepatan guna memastikan tujuan kebijakan tercapai. Melalui metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini bertujuan untuk menyintesis temuan-temuan dari berbagai studi terdahulu mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Tinjauan ini akan memetakan faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai status implementasi kebijakan saat ini sebagai dasar perumusan strategi pengelolaan sampah yang lebih adaptif dan berkelanjutan di masa depan.

## II. METODE

Pendekatan penelitian ini menerapkan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode utama untuk mengumpulkan, menyeleksi, dan mengintegrasikan hasil penelitian terkait topik pengelolaan sampah. SLR dilaksanakan melalui tahap penelusuran sistematis terhadap publikasi ilmiah, diikuti proses penyaringan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelum analisis dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang valid dan komprehensif mengenai pola temuan, kesenjangan penelitian, serta konsistensi hasil antar studi (Sucipto et al., 2024). Proses seleksi literatur dilakukan dengan mengacu pada prinsip transparansi metodologis, sehingga setiap keputusan seleksi dapat ditelusuri kembali.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengikuti panduan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). PRISMA menyediakan kerangka pelaporan berbasis diagram alur yang membantu peneliti menyusun proses identifikasi, seleksi, kelayakan, hingga inklusi studi secara sistematis dan terukur (Page et al., 2021). Selain memastikan konsistensi prosedur, penggunaan PRISMA juga mendorong evaluasi kritis melalui penerapan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat, sehingga hanya literatur relevan yang dianalisis. Manfaat utama pendekatan ini meliputi perumusan pertanyaan penelitian secara eksplisit, penetapan batasan pencarian yang objektif, serta peningkatan kualitas interpretasi temuan.

Sumber utama pengumpulan referensi pada penelitian ini adalah Google Scholar, karena basis data tersebut menyediakan akses luas terhadap artikel jurnal, prosiding, tesis, dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah. Google Scholar memungkinkan peneliti melakukan pencarian berbasis kata kunci secara cepat serta menelusuri kutipan dan keterkaitan antar publikasi, sehingga efisiensi proses identifikasi literatur dapat ditingkatkan. Pemanfaatan platform ini selaras dengan praktik ilmiah kontemporer yang menekankan keseimbangan antara kemudahan akses, cakupan publikasi, dan akurasi seleksi sumber.

Tabel 1 Proses Pencarian dalam Mengumpulkan Data

Pengambilan Data	Kata Kunci
Google Scholar	Allintitle: "Evaluasi Kebijakan" DAN "Pengelolaan Sampah"

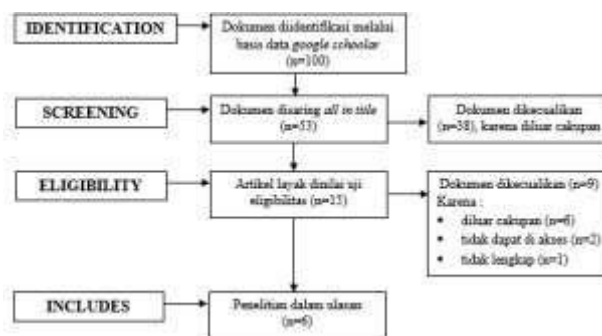
Sumber : Pribadi Penulis

Pada tahap screening, peneliti melakukan pemilihan literatur secara sistematis berdasarkan kesesuaian topik dan kontribusinya terhadap tujuan penelitian. Proses ini menghasilkan ringkasan awal serta identifikasi dokumen

yang layak dianalisis lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah eligibility, yaitu seleksi lanjutan yang mempertimbangkan stabilitas temuan, relevansi isi, serta konsistensi metodologis dari setiap dokumen. Pada fase ini, sumber yang telah mengalami tinjauan sekunder atau bersifat ringkasan (misalnya review tanpa data empiris) dikeluarkan agar tidak mengganggu integritas kajian sistematis.

Penelitian ini menerapkan empat kriteria seleksi utama. Pertama, rentang publikasi dibatasi pada lima tahun terakhir, yakni 2021–2025; artikel di luar periode tersebut tidak dimasukkan. Kedua, hanya dokumen yang menyajikan data empiris yang diterima, sehingga publikasi berbasis tinjauan literatur, buku, atau prosiding tidak diikutsertakan. Ketiga, bahasa publikasi dibatasi pada bahasa Indonesia untuk menjaga konsistensi terminologi dan konteks kebijakan. Keempat, artikel yang digunakan harus terindeks dalam sistem SINTA guna memastikan standar kualitas ilmiah yang memadai (Tanjung et al., 2023). Proses seleksi ini kemudian divisualisasikan dalam diagram alur PRISMA, yang berfungsi sebagai panduan transparansi dalam pelaksanaan kajian sistematis.

Gambar 1 PRISMA Flowchart



Sumber : Pribadi Penulis 2025

## III. HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil penyaringan menggunakan pedoman PRISMA, diperoleh kumpulan artikel yang relevan dengan topik evaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Dari total kurang lebih 100 publikasi yang teridentifikasi pada tahap awal, hanya 15 artikel yang memenuhi kriteria penelitian dan dianalisis lebih lanjut. Proses pemetaan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada kategori seleksi yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga artikel yang dipilih benar-benar mencerminkan fokus kajian dan memiliki kontribusi empiris terhadap analisis kebijakan.

Kriteria pemilihan artikel ditetapkan secara ketat untuk menjaga konsistensi metodologis. Seluruh publikasi harus diterbitkan pada rentang tahun 2021–2025, tersedia melalui Google Scholar, serta menggunakan bahasa Indonesia. Artikel yang digunakan berasal dari berbagai jurnal nasional, termasuk Jurnal Riset Multidisiplin, Berajah Jurnal, Jurnal Unisma, Jurnal IPDN, Jurnal Management & Public Policy, serta Jurnal Senadka. Setiap artikel kemudian dicatat berdasarkan judul, nama penulis, tahun publikasi, serta metode penelitian dan temuan utama yang mendukung tujuan evaluasi.

Tabel 2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
----------	---------	----------

Rentang Waktu	Antara 2021 hingga 2025	Kurang dari 2021
Jenis Dokumen	Artikel Penelitian	Review, Buku, Website
Teori	William N. Dunn	Selain William N. Dunn
Bahasa	Bahasa Indonesia	Selain Bahasa Indonesia
Akses	Dapat Diakses	Tidak Dapat Diakses

Sumber : Pribadi Penulis 2025

No.	Judul	Penulis(tahun)	Metode	Hasil
1	EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG	Anggita Sholehati & Dyah Lituhayu, 2025	Kualitatif Deskriptif	<b>Efektivitas Belum Tercapai:</b> Capaian pengurangan sampah 27,67% dari target 28%. <b>Efisiensi Belum Tercapai:</b> Pemeliharaan TPST menggunakan anggaran operasional, mengakibatkan berkurangnya TPST yang aktif. Penerapan teknologi di TPS dan TPA juga gagal. <b>Kecukupan Belum Tercapai:</b> Jumlah TPS yang tersedia (254) tidak memadai dari jumlah ideal (396). Fasilitas pengolahan di sumber juga tidak memadai. <b>Pemerataan/Keadilan Belum Tercapai:</b> Persebaran TPS dan informasi pengelolaan

				sampah tidak merata di seluruh wilayah kota. <b>Responsivitas Tercapai:</b> Adanya respons cepat dari tim Pasgat (Petugas Angkut Sampah) terhadap keluhan tumpukan sampah dan penggunaan <i>eco enzyme</i> untuk mengurangi bau. <b>Ketepatan/Akurasi Belum Tercapai:</b> Target kebijakan (pengurangan sampah dan pemenuhan sarana) belum terwujud.
2	EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA SEMARANG	Aji Primanto & Linda Puspitasari, 2025	Kualitatif Deskriptif	<b>Efektivitas Belum Optimal:</b> Kebijakan (Perda) memiliki dampak terbatas pada pengurangan sampah plastik dan belum signifikan dalam mitigasi risiko banjir. <b>Efisiensi Terhambat:</b> Tidak adanya integrasi yang optimal antara sektor formal (Dinas) dan sektor informal (pemulung, pengepul) dalam rantai daur ulang. <b>Kecukupan Belum Optimal:</b> Sosialisasi dan

				<p>edukasi mengenai bahaya plastik dan pemilahan sampah masih belum memadai.</p> <p><b>Pemerataan/ Keadilan Terdapat Kesenjangan:</b> Layanan pengangkutan sampah dan akses fasilitas daur ulang tidak merata antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran.</p> <p><b>Responsivitas Cukup Baik:</b> Pemerintah telah merespons masalah dengan menerbitkan beberapa regulasi terkait pengurangan plastik, namun implementasinya lemah.</p> <p><b>Ketepatan/Akurasi (Tidak dianalisis spesifik)</b></p>			<p>peningkatan pelatihan.</p> <p><b>Kecukupan Belum Cukup:</b> Fasilitas dan sarana prasarana penunjang (TPS3R, tong sampah pilah) di tingkat desa masih kurang memadai.</p> <p><b>Pemerataan/ Keadilan Belum Merata:</b> Desa dengan dukungan dana dan SDM yang kuat menunjukkan hasil positif, sementara desa/wilayah lain masih menghadapi kendala.</p> <p><b>Responsivitas Cukup Responsif:</b> Pemerintah daerah merespons dengan mengeluarkan kebijakan Zero Waste untuk mengatasi krisis sampah yang ada.</p> <p><b>Ketepatan/Akurasi Belum Optimal:</b> Implementasi nilai-nilai lokal (<i>zero waste</i>) belum maksimal dan perlu penyesuaian strategi di tingkat desa.</p>
3	EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS ZERO WASTE DI KABUPATEN BADUNG, BALI	Erinaldi, ade Chandra, Angelina Ramadhani, Ulfa Muti'ah, 2025	Kualitatif Deskriptif	<p><b>Efektivitas Belum Sepenuhnya Efektif:</b> Timbulan sampah masih tinggi (547 ton/hari). Pengelolaan sampah dari sumber belum berjalan optimal.</p> <p><b>Efisiensi Kurang Efisien:</b> Sumber daya (terutama SDM) yang terlibat belum merata dan memerlukan</p>			
4	EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA WISATA				Elly Ira Rayani, Suyeno, Langgeng Rachmatullah Putra, 2025	Kualitatif Deskriptif	<p><b>Efektivitas Kurang Efektif:</b> Meskipun inovasi berjalan, pengelolaan sampah secara</p>

	EDUKASI TALANGA GUNG, MALANG		keseluruhan masih belum mampu mengatasi masalah sampah di Kabupaten Malang. <b>Efisiensi Kurang Efisien:</b> Anggaran yang digunakan <b>cukup besar</b> namun belum dapat mengatasi permasalahan sampah secara komprehensif. <b>Kecukupan Belum Tercapai:</b> Masih terdapat kekurangan TPS di wilayah yang mendukung operasional TPA. <b>Pemerataan/ Keadilan Sudah Cukup Baik:</b> Inovasi (seperti pembuatan gas metan) dirasakan secara merata dan memberikan manfaat signifikan bagi warga sekitar TPA (mencapai 80%). <b>Responsivitas Sangat Positif:</b> Kebijakan dan inovasi TPA (gas metan) mendapat respon sangat baik dari warga, terutama kelompok miskin.	5	EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KEMANTRIN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KEMANTRIN UMBULHARJO, YOGYAKARTA	Dwi Irawan Jati, 2025	Kualitatif Deskriptif	<b>Ketepatan/Akurasi (Tidak dianalisis spesifik)</b> <b>Efektivitas Belum Optimal:</b> Secara umum belum berjalan optimal, namun kebijakan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah. <b>Efisiensi Terhambat:</b> Keterbatasan alokasi anggaran dan SDM yang tidak sebanding dengan beban kerja. <b>Kecukupan Belum Memadai:</b> Kekurangan fasilitas dan sarana prasarana pendukung, termasuk armada pengangkut dan lokasi pemilahan. <b>Pemerataan/ Keadilan Belum Merata:</b> Meskipun dirancang untuk semua, masih ada masyarakat yang belum teredukasi dengan baik dan perbedaan partisipasi antar wilayah. <b>Responsivitas Cukup Baik:</b> Pemerintah Kemantren dan Lurah
--	---------------------------------------	--	--	---	--	-----------------------	-----------------------	--

				merespons cepat terhadap masalah TPA Piyungan dan tumpukan sampah liar. <b>Ketepatan/Akurasi (Tidak dianalisis spesifik)</b>
6	EVALUASI PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARIMUN	(Putri et al., 2024)	Kualitatif Deskriptif	<b>Efektivitas Terhambat:</b> Implementasi masih terkendala oleh berbagai faktor, menyebabkan tujuan pengelolaan sampah belum maksimal. <b>Efisiensi Terhambat:</b> Anggaran dan alokasi dana belum memadai untuk mendukung peningkatan infrastruktur. <b>Kecukupan Belum Memadai:</b> Keterbatasan infrastruktur utama seperti kurangnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan kapasitas TPA. <b>Pemerataan/Keadilan (Tidak dianalisis spesifik)</b> <b>Responsivitas Cukup Baik:</b> Perbup adalah bentuk respons pemerintah terhadap masalah lingkungan dan peningkatan volume sampah.

				<b>Ketepatan/Akurasi Kurang Tepat:</b> Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan belum sepenuhnya memperhitungkan karakteristik spesifik wilayah Kepulauan.
--	--	--	--	---

Sumber : Pribadi Penulis 2025

Setelah proses screening dilakukan, sebanyak 53 dokumen dinyatakan sesuai untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap berikutnya, yaitu eligibility, menyaring kembali dokumen tersebut hingga tersisa 15 dokumen. Pada fase kelayakan lanjutan, penerapan kriteria kualifikasi menghasilkan 6 dokumen yang dianggap memenuhi standar kualitas dan relevansi penelitian.

Usai tahap eligibility, seluruh dokumen tersebut ditelaah secara mendalam melalui proses evaluasi kritis. Setiap artikel dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi judul, meninjau abstrak, serta membaca keseluruhan isi dokumen guna menemukan tema utama dan substansi penelitian yang relevan.

#### Diskusi

Evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di beberapa wilayah di Indonesia, yang dianalisis menggunakan enam dimensi dari William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan), secara umum menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih berada pada tingkat yang belum optimal.

##### 1. Efektivitas

Hasil studi menunjukkan bahwa dimensi efektivitas kebijakan sebagian besar belum tercapai atau kurang optimal dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Di Kota Semarang, capaian reduksi sampah (27,67%) sedikit di bawah target minimal yang ditetapkan (28%), menandakan ketidakefektifan secara numerik. Kebijakan pengelolaan sampah plastik di Semarang juga dinilai belum optimal karena dampak pengurangan yang terbatas dan mitigasi risiko banjir yang belum signifikan. Demikian pula, kebijakan Zero Waste di Kabupaten Badung dilaporkan belum sepenuhnya efektif karena volume timbulan sampah harian masih tinggi dan pengelolaan dari sumber belum optimal. Meskipun demikian, studi di Kemantren Umbulharjo mencatat adanya keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah, meskipun efektivitas secara keseluruhan masih terkendala.

##### 2. Efisiensi

Hambatan utama dalam dimensi efisiensi adalah permasalahan alokasi anggaran dan integrasi sumber daya. Di Kota Semarang, efisiensi belum tercapai karena pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) menggunakan anggaran dari hasil operasional, yang menyebabkan berkurangnya jumlah TPST yang aktif. Selain

itu, implementasi teknologi pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPA dinyatakan gagal. Secara spesifik pada pengelolaan sampah plastik di Semarang, efisiensi terhambat oleh ketidakadaan integrasi yang baik antara sektor formal dan informal. Di Kemantren Umbulharjo dan Kabupaten Karimun, isu utama adalah keterbatasan dan ketidakcukupan alokasi anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan dan beban kerja, serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat

### 3. Kecukupan

Hasil evaluasi konsisten menunjukkan bahwa kecukupan fasilitas dan sarana prasarana merupakan kendala fundamental. Di Kota Semarang, jumlah TPS yang tersedia (254 unit) dinilai tidak memadai dibandingkan kebutuhan ideal (396 unit). Kondisi serupa dialami di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Badung, di mana implementasi kebijakan terhambat oleh keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya TPS, kapasitas TPA, serta sarana penunjang seperti TPS3R. Demikian pula, studi di TPA Wisata Edukasi Talangagung dan Kemantren Umbulharjo mengindikasikan bahwa kecukupan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung pengelolaan sampah belum terpenuhi.

### 4. Pemerataan/Keadilan

Dimensi pemerataan menunjukkan adanya disparitas dalam distribusi manfaat dan layanan. Di Kota Semarang, pemerataan layanan belum tercapai akibat persebaran TPS dan informasi pengelolaan sampah yang tidak merata di seluruh wilayah, serta adanya kesenjangan layanan antara pusat kota dan daerah pinggiran. Kebijakan Zero Waste di Badung juga menunjukkan hasil yang belum merata, di mana keberhasilan program sangat tergantung pada dukungan finansial dan SDM di tingkat desa. Namun, terdapat temuan positif di TPA Talangagung, di mana manfaat dari inovasi (seperti pembagian gas metan) telah terdistribusi dengan baik dan dirasakan oleh sebagian besar (80%) warga sekitar.

### 5. Responsivitas

Secara umum, dimensi responsivitas kebijakan menunjukkan indikasi yang cukup baik. Pemerintah daerah seringkali merespons masalah dengan cepat, baik melalui penerbitan regulasi (seperti Perbup di Karimun) maupun tindakan lapangan (seperti penanganan cepat tumpukan sampah oleh tim Pasgat dan penggunaan eco enzyme di Semarang, serta respons cepat terhadap penutupan TPA Piyungan di Umbulharjo. Respons terhadap inovasi pengelolaan di TPA Talangagung bahkan mendapat respon sangat positif dari masyarakat setempat.

### 6. Ketepatan/Akurasi

Ketepatan kebijakan, yang mengukur kesesuaian desain kebijakan dengan permasalahan yang ada, mayoritas dinilai belum optimal. Target kebijakan di Kota Semarang belum sepenuhnya terwujud, sehingga ketepatan tujuan dipertanyakan. Di Kabupaten Karimun, kebijakan dinilai kurang tepat karena sistem pengelolaan sampah yang diterapkan belum sepenuhnya memperhitungkan karakteristik spesifik wilayah kepulauan. Serupa, penerapan nilai-nilai lokal dalam kebijakan Zero Waste di Badung

dinilai belum maksimal dan memerlukan penyesuaian strategi implementasi di tingkat operasional.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian melalui Systematic Literature Review (SLR) terhadap studi evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan saat ini masih menghadapi tantangan multidimensi dan belum berjalan optimal. Mengacu pada kriteria evaluasi William N. Dunn, kelemahan utama terletak pada aspek kecukupan dan efisiensi, di mana keterbatasan infrastruktur (TPS dan TPA) serta minimnya anggaran operasional menjadi penghambat fundamental di hampir seluruh wilayah studi. Aspek efektivitas juga belum tercapai maksimal, ditandai dengan capaian reduksi sampah yang masih di bawah target dan pengelolaan dari sumber yang belum masif. Selain itu, aspek pemerataan dan ketepatan masih menunjukkan kesenjangan, baik dalam distribusi layanan antarwilayah maupun ketidaksesuaian desain kebijakan dengan karakteristik lokal, seperti yang terjadi di wilayah kepulauan.

Meskipun demikian, terdapat temuan positif pada aspek responsivitas, di mana pemerintah daerah menunjukkan tanggapan isu-isu mendesak dan keluhan masyarakat terkait tumpukan sampah. Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, diperlukan transformasi strategi yang tidak hanya berfokus pada responsivitas jangka pendek, tetapi juga perbaikan sistemik melalui peningkatan investasi infrastruktur, penguatan penegakan hukum, serta integrasi sektor informal dalam sistem ekonomi sirkular.

## REFERENSI

- [1] Erinaldi, Chandra, A., Ramadhani, A., & Muti'ah, U. (2025). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Zero Waste: Studi Kasus di Kabupaten Badung, Bali. 2, 908–918.
- [2] Jati, D. I. (2025). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kemantren Dalam Pengelolaan Sampah di Kemantren Umbulharjo Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta. 167–186.
- [3] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- [4] Primanto, A., & Puspitasari, L. (2025). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Semarang. 615–624.
- [5] Putri, I. S., Saragih, M. F., & Zulkarnaini. (2024). Evaluasi Peraturan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun. *PROSIDING SENADIKA : Seminar Nasional Akademik*, 1(1), 727–736.
- [6] Rayani, E. I., Suyeno, & Putra, L. R. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) WISATA EDUKASI TALANGAGUNG (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 19(5), 38–46.
- [7] Sholehatin, A., & Lituhayu, D. (2025). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. 1–9.
- [8] Sucipto, S., Sukri, M., Patras, Y. E., & Novita, L. (2024). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(1). <https://doi.org/10.20961/jkc.v12i1.84353>
- [9] Tanjung, A., Fitriasia, A., & Ofianto. (2023). Systematic Literature Review: Analisis Tren, Metode Dan Tantangan Dalam Penelitian Di Bidang Ilmu Administrasi Publik. *Ensiklopedia of Journal* Vol. 5 No.2 Edisi 3 Januari 2023, 5(2), 37–45. <https://jurnal.ensiklopediaiku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1550%0Ahttps://jurnal.ensiklopediaiku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/download/1550/1590>